

**RENCANA KERJA (RENJA)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI MALUKU**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah – langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja K/L serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan serta merupakan alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang

dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) serta dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang bertujuan untuk melakukan perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan sehingga pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (LP2P), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
12. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Maluku adalah:

- a. Untuk membuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas bidang urusan Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada tahun 2023;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tahun 2023 yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas antara tujuan dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan perencanaan

- pembangunan Provinsi Maluku;
- c. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
Bab II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Bab III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
	3.1. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah
	3.2. Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
	3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab V	Penutup

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai dan tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Adapun penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2023 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2023; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku menurut DPPA Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 11.194.585.080,- yang terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp. 10.859.584.050,- dan anggaran belanja modal Rp.335.001.030,- yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan 8 (delapan) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

Sedangkan alokasi anggaran 2020 yang diterima Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku menurut DPPA 2020 adalah sebesar Rp. 6.957.738.054,- yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.305.992.600,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.651.745.454,- yang dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan 6 (enam) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) sebagai berikut:

Tabel 1. (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (Tahun Berjalan)
Provinsi Maluku

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target	Uraian	Realisasi	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun berjalan (tahun n-1))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2															
2	11														
2	11	01													
2	11	01	1.01												
2	11	01	1.01	01											
2	11	01	1.02												
2	11	01	1.02	01											
2	11	01	1.05												
2	11	01	1.05	09											
2	11	01	1.06												
2	11	01	1.06	01											
2	11	01	1.06	02											
2	11	01	1.06	03											
2	11	01	1.06	04											
2	11	01	1.06	05											
2	11	01	1.06	08											
2	11	01	1.06	08											
2	11	01	1.07												
2	11	01	1.07	09											
2	11	01	1.08												
2	11	01	1.08	01											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)						Target program dan kegiatan ((Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
			1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100						
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	48	80.00
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang yang dipekerjakan sebagai penyedia jasa pelayanan umum kantor	76	Orang	20	Orang	11	Orang	11	Orang	100	15	Orang	46	60.53
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebagai penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah	12	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100	2	Jenis	6	50.00
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah frekuensi penyediaan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	21947	Kali	10660	Kali	3901	Kali	3901	Kali	100	2462	Kali	17023	77.56
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah frekuensi penyediaan pemeliharaan peralatan kantor	291	Kali	60	Kali	33	Kali	33	Kali	100	66	Kali	159	54.64
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan	1	Gedung		Gedung		Gedung		Gedung			Gedung		
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dibuat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan	7	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50	1	Dokumen	3	42.86
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah jenis dokumen KLHS Provinsi yang dibuat sesuai kebutuhan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan	6	Jenis	1	Jenis	2	Jenis	1	Jenis	50	1	Jenis	3	50.00
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Provinsi yang dibuat sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1	100.00
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang dibuat sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Dokumen	2	100.00
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	16	Upaya	4	Upaya	3	Upaya	3	Upaya	100	3	Upaya	10	62.50
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	11	Upaya	3	Upaya	2	Upaya	2	Upaya	100	2	Upaya	7	63.64
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pemantauan kualitas air sungai dan air laut	11	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	7	63.64
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung yang diidentifikasi dan mendapat sosialisasi pembentukan kampung iklim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	21	Kampung	3	Kampung	3	Kampung	3	Kampung	100	5	Kampung	11	52.38
						Jumlah penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang terdata dan terevaluasi per tahun	2,762,620	TonCO ₂ eq	2,850,430	TonCO ₂ eq	2,482,007	TonCO ₂ eq	2,740,350	TonCO ₂ eq	110.41	2,575,560	TonCO ₂ eq	2,740,350	99.19
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	11	Upaya	3	Upaya	2	Upaya	2	Upaya	100	2	Upaya	7	63.64
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Masyarakat	5	Informasi	1	Informasi	1	Informasi	1	Informasi	100	1	Informasi	3	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)					Target program dan kegiatan ((Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
			7	Upaya	2	Upaya	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	1	Upaya	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
							4	Upaya	1	Upaya						1	Upaya	8=(7/6)*100	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	7	Upaya	2	Upaya	2	Upaya	2	Upaya	100	1	Upaya	5	0
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	4	Upaya	1	Upaya	1	Upaya	1	Upaya	100	0	Upaya	2	50.00
2	11	03	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah luasan kawasan terumbu karang yang terehabilitasi	4950	m ²	0	m ²	1600	m ²	1600	m ²	100	0	m ²	1600	32.32
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Maluku	6	Upaya	2	Upaya	1	Upaya	1	Upaya	100	1	Upaya	4	66.67
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah objek pengumpul LB3 lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diawasi	24	Objek	8	Objek	4	Objek	4	Objek	100	4	Objek	16	66.67
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah objek usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang dievaluasi dan dibina dalam pengelolaan limbah B3 sebagai bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat	211	Objek	89	Objek	50	Objek	55	Objek	110	24	Objek	168	79.62
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah upaya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku	6	Upaya	2	Upaya	1	Upaya	1	Upaya	100	1	Upaya	4	66.67
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku	110	Izin	6	Izin	50	Izin	55	Izin	110	18	Izin	79	71.82
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kabupaten/Kota yang diawasi dalam pelaksanaan kajian dampak lingkungan hidup	62	Instansi	18	Instansi	11	Instansi	11	Instansi	100	11	Instansi	40	64.52
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah objek usaha/kegiatan yang diawasi dalam implementasi izin lingkungan dan izin PPLH	110	Objek	6	Objek	50	Objek	57	Objek	114	18	Objek	81	73.64
2	11	07			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPPLH	Jumlah objek pengakuan dan/atau peningkatan kapasitas MHA atau MA dalam PPLH di Provinsi Maluku	214	Objek	150	Objek	55	Objek	55	Objek	100	0	Objek	205	95.79
2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah upaya peningkatan kapasitas MHA atau MA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	1	Upaya	1	Upaya	1	Upaya	1	Upaya	100	0	Upaya	2	200.00
2	11	07	1.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah objek Kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal di 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku yang diinventarisir dan diberdayakan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	205	Objek	150	Objek	55	Objek	55	Objek	100	0	Objek	205	100.00
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah upaya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	1	Upaya	1	Upaya	1	Upaya	1	Upaya	100	1	Upaya	3	300.00
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah jenis edukasi bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada anggota masyarakat	10	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100	2	Jenis	6	60.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)						Target program dan kegiatan ((Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan tahun 2022 (n-1)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 (Tahun berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1		2		3		4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100	
2	11	08	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang diedukasi tentang pengelolaan sampah	3675	Orang	225	Orang	300	Orang	300	Orang	100	300	Orang	825	22.45		
2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi yang diberikan untuk masyarakat	5	Jenis	0	Jenis	1	Jenis	0	Jenis	0	1	Jenis	1	20.00		
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi	5	Penghargaan	0	Penghargaan	1	Penghargaan	0	Penghargaan	0	2	Penghargaan	2	40.00		
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah objek penilaian kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	234	Objek	196	Objek	50	Objek	42	Objek	84	2	Objek	240	102.56		

Dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2021 lampiran Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017), maka dapat dilihat hasil yang telah dicapai pada tahun anggaran 2021 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 211.419.542,- dengan output 1 (satu) dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun melalui hasil kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup/Forum SKPD.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 93,02%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja paket pengiriman sebesar Rp. 550.500,- dan perjalanan dinas biasa sebesar Rp.14.204.700,-.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 4.155.588.158,- dengan output 41 orang ASN Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dibayarkan gaji dan tunjangan selama 12 bulan dalam tahun anggaran berjalan.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 95,72%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp.50.171.666,-, Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp. 11.880.000,-, Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebesar Rp. 10.340.000,-, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp. 1.292.135,-, Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp. 75.848,-, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp. 465.176,-, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebesar Rp. 415.828,-, Belanja Iuran

Jaminan Kematian PNS sebesar Rp.335.183,-, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp. 58.199.777,- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp. 41.734.642,-, Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebesar Rp. 5.250.000,- yang merupakan sisa anggaran dikarenakan pembayaran disesuaikan dengan tagihan rekening pemakaian listrik, telepon dan internet.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 99.999.946,- dengan output 4 orang ASN Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis bidang lingkungan hidup.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 70,88%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.29.122.000,-.

1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 5.999.730,- dengan output penyediaan alat – alat penerangan dan perlengkapan komponen listrik sebanyak Bateray Kalk. Ukuran Kecil (A B C) 15 buah, Bateray Kalk. Ukuran Kecil (Eveready) 14 buah, Bateray Kalk. Ukuran Besar (Eveready) 16 buah, Bateray Kalk. Ukuran Sedang (Eveready) 15 buah, Bateray Kalk. Ukuran Sedang (Nasional) 16 buah, Bateray Segi Empat (Warles) (Nasional) 12 buah, Isolasi Ban Listrik 10 buah, Kabel 2 x 1,5 m 30 meter, Kabel 2 x 2,5 m 30 meter, Kabel 2 x 3,1/5 m 30 meter, Kabel 2 x 4 m 30 meter, Kabel Merah Hitam 25 meter, Lampu

Philips 23 Watt 25 buah, Lampu Philips 24 Watt 25 buah.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 229.484.200,- dengan output penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak AC LG 2 PK 19EMV 2 unit, AC 1/2 PK AR05KRFLAW 1 unit, Mesin Potong Rumput Stil No. 2 1 unit, Kursi Kerja Eselon III/IV 2 buah, Kursi Kerja Staf 5 buah, Printer Epson L210+infus 2 unit, Printer Epson L360+infus 2 unit, Meja Kerja Eselon IV - Ka.Seksi/ Ka.Subag/ SeKel 2 buah, Meja Kerja Eselon V 5 buah, Brand Kas Krisbow 1 buah, Lemari Besi 2 buah, Lemari Ruangan Eselon III SKPD 1 buah, Komputer Desktop Apple 1 unit, Laptop 5 unit, Scanner Canon Lide 110 1 unit.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 99,84%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja modal mebel sebesar Rp. 371.250,- dan belanja modal peralatan personal computer sebesar Rp. 50,-.

1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 11.207.020,- dengan output penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak Bay Fresh Revil 18 kaleng, Bay Fresh Spray 12 kaleng, Bulu Ayam 5 buah, Clear Pembersih Kaca 18 botol, Densol 1 liter 24 kaleng, Deterjend Mama Lemon (750 ml) 24 botol, Ember Plastik 12 buah, Gayung 8 buah, Kain Pel 18 buah, Kain Pembersih Kaca 4 lusin, Kanfer Kamar Mandi 12 pak, Keranjang Sampah Plastik 18 buah, Keset Kaki 14 buah, Pengharum Closed 18 botol, Porstek (liter) 24 botol, Sapu Ijuk 10 buah, Sapu Lidi 16 buah, Sekop Sampah 4 buah, Sikat Closed/Nagata 7 buah, Sikat Lantai 6 buah, Tissue 37 pak, Tissue Basah 12 buah.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 23.999.802,- dengan output penyediaan bahan logistik kantor sebanyak Amplop Putih Panjang 12 dos, Ballpoint Pilot 12 buah, Bantal Cap Sedang 4 buah, Box File Plastik 10 buah, Buku Expedisi 4 buah, Buku Kas Agenda Keluar 3 buah, Buku Kas Agenda Masuk 4 buah, Buku Kwitansi Biasa 11 buah, Buku Kwitansi Proyek 3 Tanda Tangan 24 buah, Clip Berwarna 11 dos, Clip Binder No. 155 10 dos, Clip Binder No. 200 10 dos, Clip Binder No. 260 10 dos, Clip Binder No. 111 11 dos, Clip Seagul Kecil 10 dos, Hekter Kecil 5 buah, Hekter Kenko No. 3 5 buah, Hekter Max No. 10 5 buah, Isi Hekter Besar 5 dos, Isi Hekter Sedang 5 dos, Kertas HVS Folio 70 Gram 60 rim, Kertas HVS Folio Warna 2 rim, Kertas HVS Kwarto 70 Gram 60 rim, Lem Tackol Besar 4 buah, Map Batik Kertas 80 buah, Map Ordner 10 buah, Map Plastik SN/JP 10 buah, Map Snelhecter/Stof Map 10 buah, Mistar Besi 60 cm 4 buah, Penghapus White Board 4 buah, Pensil 2B 10 batang, Retype (Type-X) 4 buah, Spidol Snowman (G.12) 10 buah, Spidol Snowman (W.B) 10 buah, Stabilo Boss 4 buah, Tinta Bantalan Cap Besar 4 botol, Catridge Original Canon 810 Black 4 unit, Catridge Original Canon 811 Color 3 unit, DVD-RW 10 buah, Flash Disk 16 GB 3 buah, Hardisk External HD 1TB Seagate 1 unit, Tinta Printer Hitam 75 dos, Tinta Printer Warna 70 dos.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 25.999.985,- dengan output penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak spanduk 12 lembar, kartu ucapan 100 lembar, penggandaan bahan/surat 27.517 lembar, penggandaan DPA 12.000 lembar, penggandaan Laporan Keuangan 6.500 lembar, penggandaan RKA 12.000 lembar.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

1.4.6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 11.756.800,- dengan output 284 orang yang disediakan makan dan minum dalam rapat atau pertemuan dinas serta kunjungan sebagai tamu.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

1.4.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 326.328.000,- dengan output perjalanan dinas oleh Eselon II di dalam daerah (Kabupaten/Kota) sebanyak 6 kali dan di luar daerah sebanyak 8 kali, perjalanan dinas oleh Eselon III di luar daerah sebanyak 6 kali, perjalanan dinas di luar kantor yang lebih dari 8 jam oleh ASN Golongan III sebanyak 26 kali.

Realisasi : Fisik 75% dan keuangan 72,20%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja perjalanan dinas biasa yang tidak terpakai sebesar Rp. 90.714.272,-.

1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 147.599.970,- dengan output 1 gedung pengolahan limbah (IPAL) insenerator yang terbangun.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan 0%

Permasalahan : Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena adanya penolakan pembangunan Insenerator (Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis) oleh masyarakat Negeri Suli yang merupakan penduduk di sekitar lokasi pembangunan.

1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 1.860.000,- dengan output penyediaan meterai 6.000 sebanyak 62 buah, meterai 3.000

sebanyak 36 buah, meterai 10.000 sebanyak 138 buah.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 164.400.000,- dengan output pembayaran tagihan telepon dengan nomor (0911) 314552 sebanyak 1 unit selama 12 bulan dan pembayaran tagihan telepon dengan nomor (0911) 353118 sebanyak 1 unit selama 12 bulan, pembayaran tagihan listrik sebanyak 1 unit selama 12 bulan, pembayaran tambahan jaringan WiFi sebanyak 1 paket, pembayaran tagihan internet kapasitas 50 Mbps sebanyak 1 unit selama 5 bulan, serta pembayaran biaya pembelian aplikasi WebGIS tahap I sebanyak 1 paket.

Realisasi : Fisik 70% dan keuangan 66,92%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan pengembalian anggaran pembayaran tambahan jaringan WiFi sebanyak 1 paket serta sisa anggaran belanja tagihan telepon, tagihan listrik dan internet sebesar Rp. 54.382.885,-.

1.6.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 357.504.790,- dengan output 11 orang yang dipekerjakan sebagai penyedia jasa pelayanan umum kantor.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 99,39%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran pembayaran iuran BPJS kesehatan pegawai honor selama bulan Januari dan Februari tahun 2021 sebesar Rp. 2.188.158,-.

1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 78.956.000,- dengan output pengisian bahan bakar kendaraan roda dua dan roda empat sebanyak 3.900 kali serta penggunaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas Eselon II sebanyak 1 unit/tahun.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 24.959.000,- dengan output pemeliharaan AC sebanyak 10 unit/tahun, pemeliharaan Personal Computer sebanyak 2 unit/tahun, pemeliharaan Laptop sebanyak 8 unit/tahun selama 2 kali, dan pemeliharaan printer sebanyak 5 unit/tahun.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 100%

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

2.1.1. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 725.413.771,- dengan output 1 dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang dibuat untuk dilaksanakan sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah.

Realisasi : Fisik 0% dan keuangan 51,63%

Permasalahan : Pembuatan dokumen KLHS Rencana Tata Ruang tidak dapat dilaksanakan karena adanya implikasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengharuskan adanya integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) sehingga pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran 2022. Selain itu, terdapat sisa anggaran yang merupakan anggaran belanja alat/bahan

untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 718.740,-, belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah sebesar Rp. 350.000.000,- dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 186.400,-.

2.1.2. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 723.197.134,- dengan output 1 dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang dibuat untuk dilaksanakan sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 90,34%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 3.870.790,-, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebesar Rp. 491.480,- dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 65.508.400,-.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3.1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 258.434.994,- dengan output 2 laporan (laporan pemantauan kualitas air sungai dan laporan pemantauan kualitas air laut).

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 81,47%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp. 1.692.000,-, belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp.12.576.000,-, belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp.3.450.000,- dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 30.164.800,-.

3.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 374.733.403,- dengan output 3 kampung yang diidentifikasi dan mendapat sosialisasi pembentukan kampung iklim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim serta sebanyak 2.482.007 TonCO₂eq emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terdata dan terevaluasi.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 84,72%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp.1.925,-, belanja belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.906.000,-, dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.56.365.400,-.

3.2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3.2.1. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 165.489.791,- dengan output 1 informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang diberikan kepada Masyarakat.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 97,23%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp. 78.446,-, dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.4.509.917,-.

3.2.2. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 635.252.912,- dengan output 1 upaya penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 80,66%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp. 2.052.000,-, belanja bahan – bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp. 3.793.350,-, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp. 72.724,-, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebesar Rp.645.700,-, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp. 39.364.600,-, belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp. 13.010.000,- belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp.13.200.000,-, belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp.1.500.000,-, belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp.825.000,-, belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp.5.500.000,-, belanja sewa alat angkutan apung bermotor lainnya sebesar Rp.3.300.000,-, belanja sewa peralatan umum sebesar Rp. 17.875.000,-, dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 21.725.900,-.

3.3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 599.999.791,- dengan output 1.600 m² luasan kawasan terumbu karang yang terehabilitasi.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 94,06%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja bahan – bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp. 11.770,-, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp. 9.000,-, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebesar Rp. 26.910,-, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebesar Rp. 47.850,-, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor

lainnya sebesar Rp. 17.732.000,-, belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp. 985.000,-, belanja jasa penyelaman sebesar Rp.60.000,-, belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebesar Rp. 200.000,- dan belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 16.569.400,-.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - 4.1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 253.884.141,- dengan output 50 objek usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang dievaluasi dan dibina dalam pengelolaan limbah B3 sebagai bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat.
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 92,33%
Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 19.460.900,-.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 5.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 471.373.795,- dengan output 11 instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kabupaten/ Kota yang diawasi dalam pelaksanaan kajian dampak lingkungan hidup.
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 76,58%

Permasalahan : Adanya pengembalian anggaran belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan landscape sebesar Rp.102.400.000,- serta adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 8.007.200,-.

5.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 249.999.907,- dengan output 50 objek usaha/kegiatan yang diawasi dalam implementasi izin lingkungan dan izin PPLH.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 94,95%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 12.620.524,-.

6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

6.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

6.1.1. Sub Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 409.742.865,- dengan output 55 objek Kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal di Provinsi Maluku yang diinventarisir dan diberdayakan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 94,08%

Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 24.256.400,-.

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 7.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
 - 7.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 299.999.681,- dengan output 300 orang anggota masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang diedukasi tentang pengelolaan sampah.
Realisasi : Fisik 100% dan keuangan 90,44%
Permasalahan : Adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak sebesar Rp. 1.983.500,-, belanja sewa bangunan dan gedung kantor sebesar Rp.3.850.000,- belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.22.861.000,-.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - 8.1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 - 8.1.1. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Alokasi dana untuk sub kegiatan ini Rp. 149.999.952,- dengan output 50 objek yang dinilai kinerjanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Realisasi : Fisik 84% dan keuangan 94,99%
Permasalahan : Adanya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021 sehingga mengakibatkan tidak semua sekolah yang ditargetkan dinilai kinerjanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga capaian fisik sub kegiatan ini tidak mencapai 100%. Selain itu, adanya sisa anggaran yang merupakan sisa anggaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak

sebesar Rp.57.600,-belanja sewa bangunan dan gedung kantor sebesar Rp. 3.850.000,- belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp. 5.255.000,-, dan belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp. 2.200.000,-.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan indikator yang mengacu pada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

Keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dapat dilihat pada Tabel 2 (Tabel. T-C.30 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017) berikut ini:

**Tabel 2. (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Maluku			Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Belum Ada	Ada	Ada	Data realisasi capaian untuk tahun 2021 dan 2022 "Tidak dan Belum Ada" karena pelaksanaan kegiatan penyusunan RPPLH Provinsi Maluku belum diprioritaskan untuk dilaksanakan di tahun 2021 dan 2022 sehingga akan diprioritaskan untuk dilaksanakan pada tahun 2023
2	Indeks Kualitas Udara			83,18 – 86,00	83,36 – 86,50	83,45 – 87,00	83,79 – 87,50	90,70	N/A	92,32	93,25	Data realisasi capaian untuk tahun 2022 belum terisi karena belum selesainya pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kualitas Udara untuk tahun 2022

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Indeks Kualitas Air			68,21 – 72,41	68,84 – 72,93	69,05 – 73,16	69,57 – 73,46	55,56	N/A	59,34	59,93	Data realisasi capaian untuk tahun 2022 belum terisi karena belum selesainya pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kualitas Air Sungai untuk tahun 2022
4	Persentase sampah terkelola melalui pengembangan kinerja pengelolaan sampah			24%	26%	27%	28%	20,55%	N/A	21%	22%	Data realisasi capaian 2022 belum terisi karena belum dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan Jakstrada Provinsi Maluku untuk memperoleh perhitungan persentase sampah terkelola melalui upaya pengurangan dan penanganan sampah pada tahun 2022

2.2. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Berdasarkan tabel capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku (Tabel 2) dapat terlihat tingkat keberhasilan setiap indikator pelayanan sesuai tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Adapun indikator – indikator pelayanan tersebut merupakan indikator yang mendukung capaian kinerja pembangunan daerah.

Isu – isu penting yang teridentifikasi dari tingkat keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku meliputi:

1. Kurangnya pemahaman serta peran masyarakat dan stakeholder dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan;
2. Sistem basis data dan informasi lingkungan hidup belum optimal;
3. Lemahnya koordinasi dan fungsi pengawasan dalam penegakan hukum/sanksi;
4. Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana bidang lingkungan hidup;
5. Terbatasnya regulasi bidang lingkungan; dan
6. Belum optimalnya upaya penurunan emisi karbon serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup lainnya.

Berdasarkan isu – isu penting sebagaimana tersebut di atas, maka beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program yang harus dilaksanakan adalah program yang berkontribusi dalam capaian target kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta capaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024.
2. Memperhatikan penganggaran program dan kegiatan sesuai kebutuhan anggaran setiap sub kegiatan sehingga target indikator program dan kegiatan dapat tercapai dengan tetap memperhitungkan pengaruh faktor penghambat dan peluang capaian target.
3. Program agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang mendukung capaian kinerja pembangunan daerah.
4. Sub Kegiatan dan kegiatan harus bersinergi dengan program sehingga target

indikator program dapat tercapai.

5. Output program, kegiatan dan sub kegiatan harus bersifat terukur sehingga memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.
6. Output dan outcome program, kegiatan dan sub kegiatan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta stakeholder baik secara materiil maupun immaterill.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2023 disusun dengan tujuan sebagai dasar perencanaan dan arah kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku yang mengacu pada tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 yakni meningkatkan ketahanan lingkungan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan, perubahan iklim dan resiko bencana.

3.2. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup, ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana serta peningkatan kinerja pengelolaan persampahan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam RPJMD 2019 – 2024 serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku 2019 – 2024, maka pada Tahun Anggaran 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku merencanakan 9 (sembilan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2023

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3. (Tabel T-C.33, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PROVINSI MALUKU**

Nama SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					URUSAN WAJIB								
					Lingkungan Hidup								
2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah upaya penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi Maluku		7 Upaya	9,623,865,517	APBD		7 Upaya	7,270,058,793
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun setiap tahun anggaran		1 Dokumen	350,000,000	APBD		1 Dokumen	367,500,000
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Seram Bagian Barat	1 Dokumen	350,000,000	APBD	-	1 Dokumen	367,500,000
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses		29 Dokumen	4,363,367,566	APBD		29 Dokumen	4,581,535,944
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	42 Orang/14Bulan	4,363,367,566	APBD	-	42 Orang/14Bulan	4,581,535,944
2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		10 Orang	350,000,000	APBD		6 Orang	367,500,000
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta dan Provinsi lainnya	10 Orang	350,000,000	APBD	-	6 Orang	367,500,000

Kode				Uruan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan kebutuhan administrasi umum OPD		7 Jenis	2,787,293,077	APBD		7 Jenis	931,657,731
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bahan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	455 Bahan	14,010,150	APBD	-	455 Bahan	14,710,658
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	30 Unit	2,200,000,000	APBD	-	30 Unit	315,000,000
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan rumah tangga kantor yang diadakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	632 Bahan	26,253,150	APBD	-	632 Bahan	27,565,808
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	621 Bahan	46,719,750	APBD	-	621 Bahan	49,055,738
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	65.477 Lembar	39,331,677	APBD	-	65.477 Lembar	41,298,261
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum dalam rapat atau pertemuan dinas serta kunjungan sebagai tamu	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	728 Orang	35,250,600	APBD	-	728 Orang	37,013,130.00
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi SKPD di dalam dan luar daerah	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku serta Jakarta dan Provinsi lainnya	81 Kali	425,727,750	APBD	-	81 Kali	447,014,138
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan penyediaan kebutuhan administrasi umum OPD		1 Jenis	800,000,000	APBD		0 Jenis	0
2	11	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Ambon	1 Unit	800,000,000	APBD	-	0 Unit	0
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		3 Jenis	813,359,174	APBD		3 Jenis	854,027,133

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penggunaan jasa pengiriman surat dinas dan penyediaan meterai	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	117 Kali	4,368,000	APBD	-	117 Kali	4,586,400
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah frekuensi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	12 Bulan	297,654,000	APBD	-	12 Bulan	312,536,700
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang yang dipekerjakan sebagai penyedia jasa layanan umum kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	15 Orang	511,337,174	APBD	-	15 Orang	536,904,033
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebagai penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah		2 Jenis	159,845,700	APBD		2 Jenis	167,837,985
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah frekuensi penyediaan pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	2.462 Kali	108,910,200	APBD	-	2.462 Kali	114,355,710
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah frekuensi penyediaan pemeliharaan peralatan kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	66 Kali	50,935,500	APBD	-	66 Kali	53,482,275
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dibuat sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan		1 Dokumen	1,500,000,000	APBD		0 Dokumen	0
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah upaya penyusunan dokumen RPPLH Provinsi Maluku		1 Upaya	1,500,000,000	APBD		0 Upaya	0

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	1 Dokumen	1,500,000,000	APBD	-	0 Dokumen	0
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		3 Upaya	1,491,999,948	APBD		3 Upaya	1,566,599,945
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		2 Upaya	796,000,000	APBD		2 Upaya	835,800,000
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Maluku Tengah (Perbatasan Kota Ambon dan Maluku Tengah) untuk sungai, Kab. Buru (Teluk Kayeli) untuk laut	2 Dokumen	496,000,000	APBD	-	2 Dokumen	520,800,000
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Kab. SBB (Desa Waisamu), Kab. Buru (Desa Ubung), Kab. Malteng (Desa Allang), Kota Ambon (Desa Galala), Kab. Kep. Tanimbar (Desa Adaut), 11 Kabupaten/Kota se-Propinsi Maluku	2 Dokumen	300,000,000	APBD	-	2 Dokumen	315,000,000
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		2 Upaya	507,999,948	APBD		2 Upaya	533,399,945
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kota Ambon	1 Laporan	209,999,948	APBD	-	1 Laporan	220,499,945

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kota Ambon, Kota Tual, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Kep. Aru, Kab. Kep. Tanimbar, Kab. Buru, Kab. SBT, Kab. SBB, Kab. Maluku Tengah	22 Titik	298,000,000	APBD	-	22 Titik	312,900,000
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		1 Upaya	188,000,000	APBD	-	1 Upaya	197,400,000
2	11	03	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku	1 Dokumen	188,000,000	APBD	-	1 Dokumen	197,400,000
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Maluku		1 Upaya	212,848,994	APBD		1 Upaya	223,491,444
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah objek pengumpul LB3 lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diawasi		4 Objek	212,848,994	APBD		4 Objek	223,491,444

Kode					Uruan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	11 Kabupaten/Kota se-Propinsi Maluku	2 Dokumen	212,848,994	APBD	-	2 Dokumen	223,491,444
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah upaya pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku		1 Upaya	682,629,686	APBD		1 Upaya	716,761,170
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku		18 Izin	682,629,686	APBD		18 Izin	716,761,170
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	11 Kabupaten/Kota se-Propinsi Maluku	11 Dokumen	510,422,882	APBD	-	11 Dokumen	535,944,026
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	11 Kabupaten/Kota se-Propinsi Maluku	11 Laporan	172,206,804	APBD	-	11 Laporan	180,817,144

Kode	Uruan/Bidang Urusan Pemeintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	07			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah objek pengakuan dan/atau peningkatan kapasitas MHA atau MA dalam PPLH di Provinsi Maluku		3 Objek	142,866,402	APBD		4 Objek	150,009,722
2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah upaya pengakuan MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		1 Upaya	142,866,402	APBD		1 Upaya	150,009,722
2	11	07	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Kep. Aru, Kab. Maluku Tenggara, Kota Tual, Kab. Buru, Kab. Bursel, Kab. SBT, Kab. SBB, Kab. Maluku Tengah	2 Dokumen	142,866,402	APBD	-	2 Dokumen	150,009,722
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah upaya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat		1 Upaya	393,889,755	APBD		1 Upaya	413,584,243
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah jenis edukasi bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada anggota masyarakat		2 Jenis	393,889,755	APBD		2 Jenis	413,584,243
2	11	08	1.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Kab. MBD, Kab. Kepulauan TANIMBAR, Kota AMBON	225 Orang	393,889,755	APBD	-	Orang	413,584,243

Kode	Uruan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi yang diberikan untuk masyarakat		1 Jenis	209,999,948	APBD		1 Jenis	220,499,945
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi		1 Penghargaan	209,999,948	APBD		1 Penghargaan	220,499,945
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab. SBT dan Kab. Kep. Aru	3 Entitas	209,999,948	APBD	-	3 Entitas	220,499,945
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				300,000,000				330,000,000
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				300,000,000				330,000,000
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	11 Kabupaten/Kota se- Provinsi Maluku	11 Dokumen	300,000,000	APBD	-	11 Dokumen	330,000,000
TOTAL									14,558,100,250				10,891,005,263

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2023 ini dimulai dengan proses koordinasi dan sinkronisasi pada Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Bidang Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku serta stakeholder lainnya.

Rencana Kerja (Renja) ini akan dijadikan sebagai acuan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2023 dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan pada akhirnya sangat tergantung pada alokasi anggaran dan etos kerja yang tinggi serta komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan dan pembangunan pada jajaran Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing.

Demikian penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2023 kami buat dengan harapan dapat mengakomodir berbagai upaya penanggulangan permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada para pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Sekian dan terima kasih.

Ambon, Februari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku



Drs. ROY C. SIAUTA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660708 199803 1 003